

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEGAWAI SWASTA TERHADAP SANKSI PENUNGGAKAN PEMBAYARAN IURAN BPJS KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

Aqris Syaid, S.K.M., S.H.

Abstrak

Dengan diberlakukannya dan diterapkannya norma atau ketentuan hukum perihal perlindungan hukum bagi Pegawai Swasta beserta dengan keluarganya terhadap adanya sanksi Penunggakan Pembayaran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan, yaitu dengan mengalihkan, melimpahkan atau membebarkannya kepada Pemberi Kerja untuk bertanggung jawab pada saat tenaga kerjanya (Pegawai Swasta) dan keluarganya membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai dengan manfaat yang diberikan, justru menjadikan ketidakpastian hukum sehingga menyebabkan terjadinya kerugian dan ketidakadilan kepada Pegawai Swasta beserta dengan keluarganya.

Penelitian hukum ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis norma atau ketentuan hukum perihal perlindungan hukum bagi Pegawai Swasta terkait dengan pemberlakuan sanksi Penunggakan Pembayaran Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan, sebagaimana yang diatur pada Pasal 42 angka 1, 2, 3, 5 dan 6 dalam Peraturan Presiden No 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan dalam perspektif kepastian hukum.

Metode penelitian hukum yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah menggunakan metode penelitian hukum *normatif/ doctrinal*, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bentuk penelitian hukum ini bersifat *deskriptif*, yaitu memberikan pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan/ peristiwa hukum yang berlaku dalam masyarakat dan berbentuk *preskriptif* yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah sesuai dengan keadaan/faktanya. Sumber data/ bahan hukum yang digunakan berjenis *data sekunder*, menggunakan metode *kualitatif* yaitu mengutamakan uraian penjelasan (*deskriptif*) secara mendalam dan detail tentang objek yang menjadi kajian dalam penelitian hukum. Kegiatan pengolahan data/ bahan hukum dimulai dengan pengumpulan, analisis dan penyajian, hingga selanjutnya dirumuskan dan disajikan secara sistematis dan *deskriptif* sesuai dengan masing-masing pokok bahasan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kepastian Hukum, Pegawai Swasta BPJS Kesehatan

**LEGAL PROTECTION FOR PRIVATE EMPLOYEES
AGAINST SANCTIONS FOR ARREARS OF BPJS
HEALTH CONTRIBUTIONS PAYMENT
IN THE PERSPECTIVE OF
LEGAL CERTAINTY**

Aqris Syaid, S.K.M., S.H.

Abstract

By enacting and implementing legal norms or provisions regarding legal protection for private employees and their families against the existence of sanctions for arrears in payments for members of the BPJS Health National Health Insurance, namely by transferring, delegating or burdening it to employers to be responsible when their workforce (private employees) and their families need health services in accordance with the benefits provided, it creates legal uncertainty that causes losses and injustice to private employees and their families.

This legal research aims to explain and analyze legal norms or provisions regarding legal protection for private employees related to the imposition of sanctions for arrears in payment of contributions for members of the National Health Insurance for BPJS Kesehatan, as stipulated in Article 42 numbers 1, 2, 3, 5 and 6 in Presidential Regulation No. 64 of 2020 concerning the Second Amendment to Presidential Regulation No. 82 of 2018 concerning Health Insurance in the perspective of legal certainty.

The legal research method used in writing this thesis is to use normative/doctrinal legal research methods, with a statutory approach (statute approach) and a conceptual approach (conceptual approach). This form of legal research is descriptive, namely providing an explanation that aims to obtain a complete description of the legal conditions/events that apply in society and is prescriptive in nature, namely research that aims to obtain suggestions about what must be done to overcome problems according to the circumstances/facts. The source of data/legal material used is secondary data, using a qualitative method, namely prioritizing in-depth and detailed descriptive descriptions of the object being studied in legal research. Data/legal material processing activities begin with collection, analysis and presentation, until then they are formulated and presented in a systematic and descriptive manner according to each subject matter.

Keyword : Legal Protection, Legal Certainty, BPJS Kesehatan Private Employees